

Komunikasi Politik Dalam Al-Quran

Mhd. Latip Kahpi

Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Email: latifkahfinasution.91@gmail.com

Abstract

Islam views power in a transcendent sense, power in this case must be accountable to the Creator. Humans are not arbitrary to exercise power, because humans are an extension of the Creator on earth. A leader in Islam is a leader who can convey messages well so that people are well influenced by the message and its contents, more than that a good leader is a leader who is able to communicate with the community, and knows one's own capacity, and also understands that what is being sought in his leadership are all the will of God. Wise in deciding many things based on what Islam has outlined are the characteristics of a good leader, not only transforming himself to Muslims but can also be wise in leading the universal Ummah in this modern era.

Keywords: *Communication, Politics, and Al-qur'an*

Abstrak

Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden, kekuasaan dalam hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. Manusia tidak sewenang-wenang untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik dimuka bumi. Pemimpin dalam Islam adalah seorang pemimpin yang bisa menyampaikan pesan dengan baik agar orang terpengaruh dengan baik terhadap pesan dan isinya, lebih dari itu seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mengetahui kapasitas diri sendiri, dan juga memahami bahwa apa yang diusahakan dalam kepemimpinannya adalah semua kehendak dari Allah. Bijaksana dalam memutuskan banyak hal dengan berpedoman apa yang sudah Islam gariskan adalah ciri-ciri pemimpin yang baik, tidak hanya mentransformasikan diri sendiri untuk umat Islam tetapi juga bisa bijaksana dalam memimpin ummat yang universal di zaman yang moderen ini.

Kata Kunci: *Komunikasi, Politik, dan Al-Quran*

A. Pendahuluan

Ajaran Islam adalah ajaran yang *rahmatan lil alamin*, ajaran Islam tidak hanya mengajarkan kita akan hubungan dengan Allah selaku pemilik semesta alam tetapi juga mengajarkan kita bagaimana hubungan sesama manusia dan alam ini. Dalam berinteraksi sesama manusia tentu kita butuh pengaturan untuk berinteraksi sesama manusia. Dalam pegangan Islam sesuatu yang mengatur itu harus berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an sebagai sumber primer umat Islam mengatur manusia seutuhnya untuk bagaimana berinteraksi yang baik antar sesama manusia, dalam berkomunikasi yang baik tentu pengaturan tersebut membutuhkan peraturan yang baik di mana manusia yang berkuasa agar dapat memahami bagaimana nilai kekuasaan dapat dijadikan amanah untuk dapat mensejahterakan manusia yang dipimpinnya.

Dalam komunikasi politik tentu interaksi-interaksi yang diperlukan dan nilai-nilai apa yang dipahami adalah berdasarkan Al-qur'an, karena sesuatu pemikiran yang baik dengan landasan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang mana nantinya pemimpin yang berdasarkan Al-qur'an akan menjadi pemimpin yang amanah dan pemimpin besar dikala waktunya tiba.

Dalam dunia politik dewasa ini yang suasananya tidak menentu dan cenderung membingungkan alangkah baiknya kita merujuk ke Al-qur'an dan sunnah Rasullullah dalam menjalankan peran politik, kekuasaan dan mengambil hikmah dan intisari dari sumber yang jelas yaitu Al-qur'an dan sunnah Rasullullah.

Semua ini membutuhkan pemahaman yang baik bagaimana komunikasi yang ada dalam Al-qur'an dan implementasi yang harus diambil dan dilaksanakan agar tujuan dari agama Islam yang *rahmatan lil alamin* dapat tercapai seperti tujuan yang Allah kehendaki.

B. Pembahasan

Politik merupakan cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.¹ Mengacu pada persoalan tersebut, Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan

¹Fauzan, *Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda*, (Tangerang: Binamuda, 2008), hal: 5

Negara atau terhadap Negara lain.”Juga dalam arti “kebajikan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).”²

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.

Pengertian politik dalam fiqh Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekati pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari’at.³

Dalam Al-qur’an tidak ditemukan kata yang berbentuk dari akar kata *sasa-yasusu*, namun ini bukan berarti Al-quran tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-qur’an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-qur’an dan sunah Nabi sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *As-Siyasah Asy-Syar’iyah* (politik keagamaan).

Uraian Al-qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan.” Dari akar kata yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.

Hukm dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata “hukum” dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti “putusan”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti “pelaku hukum” atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai “perbuatan” kata *hukm* berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai “membuat atau menjalankan keputusan”, maka tentu

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Mizan: Bandung, 1996), hal: 416

³KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, cet I 1994, Yogyakarta. Hal : 209-

pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik.⁴

Kata siasat sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmat. Disisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmat dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat. Pengertian sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.

C. Politik dalam Islam

Dalam perkembangan perpolitikan dalam Islam sejak era Nabi sampai sekarang akan kita temui berbagai macam ragam gaya politik dan komunikasi politik, baik itu ketika khalifah yang empat berkuasa sampai ke era modern yang kita kenal sekarang, tetapi dari semua itu tidak akan terlepas dari Al-qur'an sebagai pedoman penghayatan dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh penguasa-penguasa negeri Islam.

Ayat Al-qur'an yang sering sekali dirujuk sebagai rujukan adalah An-Nisa ayat 58-59 yang tergolong kedalam surat madaniyah berbunyi sebagai berikut ;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya adalah sebagai berikut : 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka

4M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hal: 417

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kedua ayat tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah SWT.⁵ Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT melalui konstitusi yang ada di dalam Al-qur'an, ini menandakan adanya *syumuliatul* Islam.

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.⁶

Kalau kita meneliti lebih jauh tentang kekuasaan dalam Surat An-Nisa 58-59, dalam latar belakang historisnya turunnya ayat ini bisa dilihat dalam Asbabun Nuzulnya sebagai berikut ;

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi dari Abi shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathu makkah (pembebasan mekkah) Rasulullah saw memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata: "Ya Rasulullah demi Allah , serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabda Rasulullah: "Berikanlah kunci itu kepadaku wahai utsman!" Utsman berkata : "inilah dia, amanat dari Allah". Maka berdirilah Rasulullah membuka ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas QS An-Nisa :58.7

Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas. Menurut imam Ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu sebagai berikut: Disaat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah mengapa ayat ini

⁵Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo,2002), hal 175

⁶Quraish Shihab, M.A. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung

⁷K.H.Qamaruddin Shaleh,dkk. *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*,(Bandung: CV Diponegoro, 1982), hal 138

dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam ma'ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.⁸

Imam Al-Qurthubiy dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an menyatakan, seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang telah dibebankan kepadanya dengan tidak melakukan kezaliman, adil dalam menegakan hukum, serta cerdas dalam mengelola keuangan Negara.⁹ Bahkan lebih jauh, Al-Qurthubiy mengatakan bahwa untuk menjalankan amanat merupakan inti dari setiap aturan-aturan yang harus dijalani. Itu artinya, betapa fundamental aspek amanat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.¹⁰

Adapun di dunia, maka di samping Dia melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, Dalam konteks kekuasaan politik, Al-qur'an memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Untuk menyampaikan pernyataan tegas berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya sebagai berikut : 26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Seperti tersurat di dalam ayat di atas, Allah SWT menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang gagal.

Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah (amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia dihadapan Allah dan sekaligus menjadi

⁸Ibid, hal 139

⁹Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), jilid 6, hal. 424

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 6, hal. 423

tantangan terhadap sifat manusia yang etis yang harus dibuktikan melalui keberhasilannya di dalam menunaikan amanah yang telah disanggupinya itu.

Amanah risalah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifatullah fi Al-Ardh. Kedudukan itu mencakup aktivitas manusia dalam memakmurkan dan memelihara bumi, menata kehidupan dan menyejahterakan umat manusia. Aktivitas ini jelas-jelas merupakan suatu tindakan dan fungsi siyasah manusia yang otentik.

Oleh sebab itu, amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk siyasah yang bertanggungjawab atas terpeliharanya keteraturan hidup ditengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan siyasah memakmurkan bumi dalam Islam memiliki tujuan dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akhirat.¹¹

Kekuasaan yang berorientasi pemerintahan (kekuasaan politik) yang mempunyai mekanisme politik tertuang di dalam Al-qur'an surat Shaad: 26 yang digolongkan ke dalam surat makkiyah :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Kekuasaan politik (pemerintahan) juga tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang di golongankan ke dalam surat Madaniyah sebagai berikut ;

¹¹ Abu Ridha, *Manusia dan Kekhalifahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal 59

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
 وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah [157] (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.¹²

D. Macam-Macam Politik

Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam:

1. *Siasah Dusturiah*

Siasah Dusturiah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata Negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai Syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebut dalam al-qur'an dan sunah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi manusia prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini.

¹²[157] Yang dimaksud di sini ialah kenabian dan kitab Zabur.

2. *Siasah Dauliyah*

Siasah Dauliah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu sistem kekuasaan di bawah risalah Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi sistem khilafah atau kekhilafahan.

Dalam sistem ini dunia internasional, dipisah dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu;

- a. Darussalam, yaitu Negara yang ditegakkan atas dasar syariat Islam dalam kehidupan.
- b. Darul-Harbi, yaitu Negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan Negara-negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga negaranya yang menganut Islam
- c. Darul-Sulh, yaitu Negara non Islam yang menjalin persahabatan dengan Negara-negara Islam, yang eksistensinya melindungi warga Negara yang menganut agama Islam

Antara Darussalam dan Darul Sulh terdapat persepsi yang sama tentang batas kedaulatannya, untuk saling menghormati dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia internasional. Keduanya saling terkait oleh konveksi untuk saling menyerang dan hidup bertetangga secara damai, sementara hubungan antara darus-salam dengan darul-harb selalu diwarnai sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak berada dalam posisi memprakarsa meletusnya perang. Perang dalam hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan.

Perang dalam rangka memperingati serangan musuh di dalam Islam memperoleh pengakuan yang sah secara hukum, dan termasuk dalam kategori jihad. Meskipun jihad dalam bentuk perang didalam mempertahankan diri atau tindakan balasan. Juga terbatas di dalam rangka menaklukan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti pembantaian atau pemusnahan. Oleh karena itu, mereka yang menyerah, tertawa, para wanita, orang tua, dan anak-anak, orang-orang cacat, tempat-tempat ibadah dan sarana serta prasarana ekologi rakyat secara umum harus dilindungi.

3. *Siasah Maaliyah*

Siasah Maaliyah merupakan politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Politik ekonomi Islam yang menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap rakyat dan tercukupinya kebutuhan pelengkap sesuai kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang yang hidup dalam negara Islam, sesuai dengan syariat Islam. Karena *income* negara untuk terealisasinya pemenuhan kebutuhan ekonomi negara

melalui zakat, *kharraj*, *jizyah*, dan denda serta segala bentuk *income* yang sesuai dengan syari'at Islam.¹³

E. Kepemimpinan dalam Konteks Komunikasi.

Kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kinerja yang demokratis. Dengan kemampuan komunikasi yang memahami kondisi sekelilingnya dan mampu berempati terhadap semua kelompok masyarakat, maka upaya untuk mencapai tujuan organisasi lebih memungkinkan untuk dicapai tanpa menghadapi penolakan dari berbagai entitas di masyarakat.

Eksistensi Kepemimpin dalam konteks komunikasi, adalah kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Haiman,¹⁴ kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui perilaku orang lain". Sedangkan Rogers¹⁵ menegaskan, "kepemimpinan sebagai kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Berdasarkan kepada dua pengertian itu, unsur – unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi.

Tetapi komunikasi untuk mempengaruhi orang lain bukan sesuatu tindakan yang mudah. Karena membangun makna bersama di antara pemimpin dan pengikut memerlukan kesadaran untuk saling berbagi informasi. Miller¹⁶ menyatakan bahwa, "komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima, dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku penerima pesan." Menjadi persoalan disini, terdapat perbedaan karakteristik antara sumber pesan dan penerima pesan, sebagaimana antara pemimpin dalam organisasi pemerintah dengan masyarakat. Sebab, upaya mempengaruhi rakyat, bukan berupaya menciptakan pemahaman bersama terhadap satu persoalan, tetapi justru lebih banyak diwarnai oleh penggunaan kekuasaan (*power*) untuk memaksa rakyat untuk menerima pesan-pesan pemerintah.

Dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan, bahwa kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari

¹³<http://www.scribd.com/doc/59945469/Makalah-Agama-Islam>

¹⁴Stogdill, Ralph M.1974. Handbook of Leadership : A Survei and Research, New York, NY, US: Free Press hal.

¹⁵Rogers, Everett M and Lynne Svenning . 1969. Modernization Among Peasant, New York : Holt, Rinehart and Winston hal.223

¹⁶Littlejohn , Stephen W. 1999.Theories of Human Communication , Fourth hal.112

pelaku yang mempunyai kekuasaan.¹⁷ Pelaku kekuasaan cenderung menggunakan model komunikasi otoritatif linier, bersifat satu arah yang tidak menghiraukan implikasi maupun umpan balik rakyat sebagai khalayak. Dalam pandangan Little John dan Karen Fosh, informasi linier, berjalan secara terus menerus menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya.¹⁸

Dalam kepemimpinan diorganisasi pemerintah, pemimpin diharapkan mampu menjalankan empat fungsi komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yaitu (1) Fungsi Kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi (2) Fungsi Motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan, (3) Fungsi Pengungkapan Emosional dalam hubungan kerja dan (4) Fungsi Informatif dalam pengambilan keputusan.¹⁹ Keempat fungsi tersebut, jika dilakukan oleh pimpinan diinstitusi pemerintah disertai dengan penggunaan komunikasi yang bertujuan membangun pemahaman bersama, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Memang tidak bisa dikesampingkan, tidak semua pemimpin mempunyai kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi. Salah satu sebab kegagalan dalam mempengaruhi orang lain atau khalayak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menerapkan pola komunikasi yang tidak disesuaikan dengan karakteristik ataupun kebutuhan penerima pesan.

Kemampuan pemimpin yang baik adalah kemampuan pemimpin untuk berijtihad dalam konteks pemikiran berdasarkan Al-Quran dan sunnah, di mana pemikiran yang muncul dan juga pesan yang disampaikan adalah berdasarkan apa yang baik terhadap masyarakat, dalam merealisasi semua hal tersebut tentu pemimpin yang baik dia akan menyampaikan pesan dan juga mempengaruhi orang dengan cara yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi Islam.

F. Hikmah Politik

Politik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki aspek yang membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Secara terperinci, Sayyid Qutub menyebutkan keadilan sosial yang bisa dipetik dari hikmah berpolitik adalah:

1. Kebebasan rohaniah yang mutlak. Kebebasan rohani di dalam Islam didasarkan kepada kebebasan rohani manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Apabila tuhan hanya Allah semata, maka

¹⁷Dahl, Robert A.1978. *Modern Political Analysis*, New Delhi, Prentice Hall of India hal.47

¹⁸Littlejohn, Stephen W and Karen Foss. 2007. *Theories of Human Communication*, Seventh Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company hal.39

¹⁹Robbins, Stephen P. 2002. *Organizational Behaviour*, New Jersey : Prentice Hall Publishing Inc.hal.243

segala sesuatu diarahkan kepada-Nya, tidak ada ibadah kecuali untuk Allah, dan manusia tidak dapat menuhankan yang lainnya, termasuk menuhankan manusia. Dengan keyakinan akan sifat-sifat Tuhan yang Maha Adil, Mahakasih Sayang, Pengampun, Penolong, dan sebagainya yang apabila diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan keadilan sosial.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Prinsip-prinsip persamaan di dalam Islam didasarkan kepada kesatuan jenis manusia di dalam hak dan kewajibannya dihadapan undang-undang, dihadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Persamaan ini didasarkan atas kemanusiaan yang mulia, bahkan persamaan yang berdasarkan kemanusiaan ini juga berlaku bagi yang non-muslim.
3. Tanggung jawab sosial yang kokoh. Islam menggariskan tanggung jawab ini di dalam segala bentuknya. Ada tanggung jawab di antara individu terhadap dirinya, dan ada tanggung jawab di antara individu terhadap keluarganya dan kaum kerabatnya, bangsanya dan bangsa-bangsa lainnya serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.²⁰

G. Penutup

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada ditangan Allah, manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu.

Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden, kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik dimuka bumi.

Pemimpin dalam Islam adalah seorang pemimpin yang bisa menyampaikan pesan dengan baik agar orang terpengaruh dengan baik terhadap pesan dan isinya, lebih dari itu seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan dia tau kapasitas dirinya, dan dia juga memahami bahwa apa yang dia usahakan dalam kepemimpinannya adalah semua kehendak dari Allah.

Bijaksana dalam memutuskan banyak hal dengan berpedoman apa yang sudah Islam gariskan adalah ciri-ciri pemimpin yang baik, dia tak hanya mentransformasikan dirinya untuk umat Islam tetapi juga dia bisa bijaksana dalam memimpin ummat yang universal di zaman yang moderen ini.

²⁰H. A. Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah." (Jakarta: kencana, 2003). Hlm, 26

Kepemimpinan dalam konteks kegiatan politik terutama di Indonesia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga bisa menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bijak. Keberlangsungan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi yang baik oleh seorang leader. Komunikasi politik sangat mempengaruhi kebijakan baik secara kelembagaan di instansi dalam pemerintah, atau juga ke pihak swasta terutama dalam hubungan bilateral. Kebijakan strategis bisa diambil dengan kemampuan komunikasi yang baik, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan multikultural.

Daftar Pustaka

- Abdul Mu'inSalim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politikdalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002.
- Abdul Mujib, *Fitrahdan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*. Jakarta: DarulFalah, 2000.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin AbiBakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Ar-Risālah, 2006), jilid 6
- Abu Ridha, *AmalSiyasi, Gerakan Politik dalam Dakwah*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media,2004.
- _____, *Manusia dan Kekhalifahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.
- Belmont California : Wadsworth Publishing Company,1999.*
- DhiauddinRais ,DR. M, *Teori Politik Islam*, Jakarta : GemaInsani Press, 2001.
- Dahl, Robert A, *Modern Political Analysis*, New Delhi : Prentice Hall of India, 1978.
- Djazuli, “*FiqhSiyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*” (jakarta: kencana, 2003).
- Fauzan, *Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda*, (Tangerang: Binamuda, 2008)

Giddens, Anthony, Capitalism and Social Modern Theory :An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber, atau Kapitalis medan Teori Sosial Klasik dan Modern : 1986.

Holt, Rinehart and Winston Stogdill, Ralph M.1974. Handbook of Leadership :A Survei and Research, New York, NY, US: Free Press.

IbnuKatsir Ad-Damasyqiy, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah), Juz 3. 1998

Littlejohn, Stephen. W, Theories of Human Communication , Fourth Edition,

Littlejohn, Stephen W and Karen Foss, Theories of Human Communication, Seventh Edition, Belmont California: Wadsworth Publishing Company, 2007.

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers, Managing By Communication, New York: New Newsey, London, Mc. GrawHill Int. Book. Co, 1988.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Mizan: Bandung, 1996)

Qamaruddin Shaleh K.H.,dkk. Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Ayat-Ayat Al-Qur'an,Bandung: CV Diponegoro, 1982.

Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an: TafsirMaudhu'iatas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung.

Robbins, Stephen P. Organizatioonal Behaviour, New Jersey: Prentice Hall Publishing Inc, 2002.

Rogers, Everett M and Lynne Svenning . 1969. Modernization Among Peasant,

Sahal Mahfudh, Nuansa FIQIH SOSIAL, (Yogyakarta: LKiS, cet I 1994)